

**Peningkatan Literasi Keuangan Bagi Pengurus Bumdes dan
Kelompok Usaha di Desa Salilama Kecamatan Managgu
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo**

Hais Dama¹

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Abstrak

Financial literacy is how to manage money by understanding banking and other financial institutions. Financial literacy is knowledge about how to manage finances, both personal finance and profit and non-profit organizations among the community. The implementation of service in the form of Real Work Lectures (KKN) aims to provide understanding to the community, especially BUMDES administrators and business groups in Boalemo Regency, Gorontalo Province. The activity will involve financial practitioners from both Bank Indonesia and the banking sector to provide training and education on how to properly and safely access sources of funding from banking financial institutions and other non-bank financial institutions. Another goal is for BUMDES administrators and business groups to understand the procedures for making simple financial reports so that they can fulfill their obligations in making financial reports as a form of business accountability. The results of the implementation of community service in the village of Bolihutuo and the village of Kaaruyan Kab. Boalemo pointed out that the optimization of digital financial literacy in the two villages still needs to be improved, this is because many business actors and BUMdes management are still not familiar with and understand the concepts and mechanisms of the Digital financial services, especially the form of digital services issued by Bank Indonesia, namely , QRIS (Quick Response Indonesia Standard), which is a web-based non-cash payment service by integrating all existing digital service methods such as OVO, Go-Pay, Internet banking, etc.

Keywords: *Financial Literacy;BUMDES; QRIS.*

Abstract

Literasi keuangan adalah bagaimana cara mengelola uang dengan memahami perbankan dan lembaga – lembaga keuangan lainnya. Literasi keuanan merupakan pengetahuan tentang bagaimana mengelola keuangan baik keuangan pribadi maupun organisasi profit dan nonprofit dikalangan masyarakat. Pelaksanaan pengabdian dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama para pengurus BUMDES dan kelompok usaha di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Kegiatan akan melibatkan para praktisi keuangan baik dari Bank Indonesia dan kalangan perbankan untuk memberikan pelatihan dan edukasi tentang bagaimana cara agar bisa mengakses sumber pendanaan dari lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan nonbank lainnya dengan baik dan aman. Tujuan lainnya adalah agar para pengurus BUMDES dan kelompok usaha memahami tata cara membuat laporan keuangan sederhana agar bisa memenuhi kewajiban dalam membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban usaha. Hasil pelaksanaan pengabdian apda masyarakat di desa Bolihutuo dan desa Kaaruyan Kab. Boalemo menunjukkan bahwa optimisasi literasi keuangan digital

dikedua desa tersebut masih perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan para pelaku usaha dan pengurus BUMdes masih banyak yang belum mengenal dan memahami konsep dan mekanisme Layanan keuangan Digital tersebut, terutama bentuk pelayanan digital yang dike;uarkan oleh Bank Indonesia yakni, QRIS (Quick Respon Indonesia Standar), yakni berupa pelayanan pembayaran non tunai berbasis web dengan mengitegarikan seluruh metode layanan digital yang sudah ada seperti, OVO, Go-Pay, Internet banking, dll.

Kata Kunci: Literasi Keuangan; BUMDES; QRIS.

© 2022 Universitas Negeri Gorontalo

Under the license CC BY-SA 4.0

Correspondence author: Hais Dama, E-mail, Gorontalo, Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat dan persaingan yang makin ketat menghendaki provinsi Gorontalo dan daerahnya untuk bisa menempatkan diri sejajar dengan daerah – daerah lain yang ada di Indonesia dalam pembangunan dan tidak terkecuali, dalam pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan. Untuk itu dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya provinsi Gorontalo telah menetapkan visi dan misinya kedepan.

Seiring dengan perkembangan zaman maka pada tahun 2012 Gubernur Gorontalo terpilih membuat konsep visi dan misi kedepan yang merupakan penyempurnaan dari yang sebelumnya. Adapun visi dan misi Provinsi Gorontalo yang telah ditentukan adalah: Dalam visinya disebutkan sebagai berikut “Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang berkeadilan di Provinsi Gorontalo”. Untuk pencapaian visi pambangunan ditetapkan Misi Provinsi Gorontalo yaitu:

1. Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan.
3. Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, Danau limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik serta terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat.
4. Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam pembangunan.
5. Menciptakan sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan system tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh kegiatannya dilaksanakan di desa yang sumber

permodalannya dimiliki oleh desa yang diperoleh dari kekayaan desa baik langsung maupun tidak langsung. Kepemilikan modal dimaksud diperoleh melalui modal penyertaan oleh desa yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan jasa dan usaha-usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Modal BUMDes berasal dari Pemerintah Desa, atau bisa juga dari bantuan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota, penyertaan modal atau kerjasama dengan pihak lain atas dasar saling menguntungkan, bisa juga melalui pinjaman. Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk dapat mendorong produktivitas warga desa. Oleh karena itu BUMDes sebagai Lembaga usaha memiliki berbagai pilihan seperti Servicing (Bisnis Sosial), Banking (Keuangan), Renting (Bisnis Penyewaan), Brokering (Lembaga Perantara), Trading (Perdagangan), Holding (Usaha Bersama) atau Contracting (Kontraktor). Yang terpenting pilihan usaha yang dipilih BUMDes tidak mematikan usaha yang sudah ada. Dengan semua kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh BUMDes, maka kemampuan literasi dan inklusi keuangan serta pendampingan peningkatan kemampuan manajerial, keterampilan dan kewirausahaan bagi pengurus BUMDes menjadi penting untuk dilakukan.

Dengan semua kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh BUMDes, maka kemampuan literasi dan inklusi keuangan serta pendampingan peningkatan kemampuan manajerial, keterampilan dan kewirausahaan bagi pengurus BUMDes menjadi penting untuk dilakukan. Maka dalam rangka meningkatkan literasi Keuangan Pengurus BUMDes, maka dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu berupa

pelatihan Keuangan yang untuk kegiatan kali ini dilaksanakan di Desa Salilama Kecamatan mananggu Kab. Boalemo Provinsi Gorontalo.

Dari latar belakang tersebut diatas, dapat diidentifikasi permasalahan utama dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Salilama serta kelompok usaha dimana pengelolaan keuangan BUMDes masih belum dapat dilaksanakan dengan baik dan transparan dikarenakan para pengurusnya belum mamahami bagaimana membuat laporan keuangan sederhana sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan usaha. Demikian pula dengan kelompok-kelompok uasaha yang ada, seperti usaha tambak ikan, pengelolaan kopra, dll. Kelompok-kelompok usaha ini masih harus dibekali dengan pemahaman cara untguk bisa mendapatkan akses permodalan dari perbankan melali edukasi dan literasi dibidang keuangan.

KAJIAN TEORI

Pengertian Uang Elektronik (electronic money) menurut Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dan juga perubahannya yaitu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor. 16/8/PBI/2014, Uang Elektronik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Selain dari pada uang elektronik juga terdapat Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012, (APMK) terdiri dari Kartu Kredit, Kartu Debet dan/atau Kartu ATM. Peraturan Bank Indonesia ini membuat aturan dan definisi dari Uang Elektronik (emoney) berbeda dari pada Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

Menurut lembaga Otoritas Jasa Keuangan (2013) menyatakan bahwa secara definisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami. Jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang OJK mengatakan bahwa hal penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat agar dapat mengelola keuangan secara pintar, agar rendahnya pengetahuan akan industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak akan mudah tertipu. Terhadap investasi-investasi bodong. (www.ojk.go.id, n.d.).

Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang individu untuk mengambil keputusan dalam hal pengaturan keuangan pribadinya. Sedangkan menurut Sri Lestari yang dikutip dari (Lisa Xu dan Bilal Zia, 2012) Financial Literacy merupakan kesadaran dan pengetahuan tentang produk-produk keuangan, lembaga keuangan, dan konsep mengenai keterampilan dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan juga dapat diartikan atau dipahami sebagai pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola keuangan guna meningkatkan kesejahteraan. Literasi keuangan juga merupakan perangkat penentu utama dalam mewujudkan keuangan inklusi yang mana tahapan ini mengandung muatan-muatan pengenalan basic knowledge dan basic skill dalam memahami sektor keuangan. Tahap literasi ini penting dalam sektor keuangan, tanpa bisa memahami karakteristik produk dan profil risiko keuangan, dapat menyebabkan potensi menjadi korban transaksi keuangan.

Aktivitas yang paling penting dalam tahapan ini adalah sosialisasi dan edukasi secara masif terkait jenis, karakter, dan profil risiko masing-masing produk keuangan serta dasar-dasar pengelolaan keuangan yang baik. Literasi tidak akan tercapai hanya dengan membangun kesadaran terhadap sektor keuangan saja melainkan harus ada program penunjang literasi tersebut. dalam hal ini terdapat empat tahapan dalam literasi keuangan yaitu literasi, penetration, density, dan delivery.

a. Literacy merupakan perangkat utama dalam mewujudkan financial inclusion, tahapan ini mengandung muatan pengenalan basic knowledge dan basic skill dalam memahami sektor keuangan dengan program yang dijalankan seperti edukasi dan kampanye nasional yang

di lakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) hal ini sejalan dengan salah satu tujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan edukasi dan perlindungan konsumen dan masyarakat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melaksanakan program literasi keuangan dengan tujuan agar masyarakat bukan hanya menjadi well literate dalam masalah keuangan, melainkan juga menggunakan produk dan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka sebagai salah satu bentuk implementasi Edukasi dan kampanye yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dilakukan dengan menyusun program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, melaksanakan edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan Penetration merupakan tahapan lanjutan dalam mewujudkan literasi keuangan, dalam tahap ini masyarakat sudah memiliki kesadaran tentang kebutuhan layanan keuangan. Kebutuhan paling penting dalam tahap ini adalah supply side layanan keuangan, baik yang berupa produk maupun infrastruktur layanan keuangan baik berupa produk maupun infrastruktur layanan seperti kantor, agen, teknologi informasi. Dalam program strategi yang di lakukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). bekerjasama dengan Industri Jasa Keuangan melaksanakan program seperti kuliah umum, training of trainer, edu expo.

b. Penetration merupakan tahapan lanjutan dalam mewujudkan literasi keuangan, dalam tahap ini masyarakat sudah memiliki kesadaran tentang kebutuhan layanan keuangan.³⁴ Kebutuhan paling penting dalam tahap ini adalah supply side layanan keuangan, baik yang

berupa produk maupun infrastruktur layanan keuangan baik berupa produk maupun infrastruktur layanan seperti kantor, agen, teknologi informasi. Dalam program strategi yang di lakukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). bekerjasama dengan Industri Jasa Keuangan melaksanakan program seperti kuliah umum, training of trainer

c. Density merupakan tahap di mana kondisi masyarakat sebagai konsumen dan lembaga jasa keuangan sebagai produsen sudah berada dalam kondisi memenuhi syarat untuk membangun jalinan kerjasama. Dalam tahap ini yang paling penting adalah adanya desain produk dan layanan keuangan yang menarik dan dapat diterima di pasar. KUR merupakan contoh dari segi Density.

d. Delivery merupakan tahap dimana literasi keuangan dan financial inclusion sudah terjadi, ditandai dengan fakta bahwa produk dan layanan keuangan yang dapat diterima dengan baik oleh pasar. Pada tahap ini kebutuhan yang paling penting adalah lembaga keuangan harus memilih jalur distribusi (delivery channel) yang dekat, mudah dijangkau oleh rakyat kecil, dan murah. Seperti pada program laku pandai yaitu layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian ini meliputi pemberian pelatihan teknik dan tata cara membuat laporan keuangan bagi pengurus Badan Usaha Milik Desa serta memberikan edukasi dan pemahaman berupa peningkatan literasi keuangan yang berikan oleh

para praktisi perbankan seperti Bank Indonesia dan lembaga keuangan nonbank bank lainnya.

A. Sasaran Pengabdian

Yang menjadi sasaran utama pelaksanaan pengabdian ini adalah para pelaku usaha dan para pengurus BUMdes yang berada di dua desa di Kabupaten Bolaemo. Sasaran ini sengaja dijadikan sebagai objek dan lokasi pengabdian dikarenakan masih minim dan kurangnya para pelaku usaha dan pengurus BUMdes memiliki pemahaman tentang keuangan digital yang saat ini telah banyak digunakan oleh masyarakat.

B. Teknik yang digunakan

Teknik pengabdian yang digunakan adalah dengan melakukan ceramah/pemberian materi oleh para pakar literasi keuangan dari Bank Indonesia dan tenaga dosen. Pelatihan dilanjutkan dengan tahapan praktek penggunaan salah satu digital money berupa Quick Respon Instrumen Settlement (QRIS) yakni berupa alat pembayaran digital yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang telah tersinkronisasi dengan digital keuangan lainnya.

C. Tahapan pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat terkait dengan literasi keuangan digital diawali dengan:

1. Pemberian materi oleh para narasumber dari Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo yang diberikan secara praktis dan sangat

mudah dipahami. Pemberian materi ini melibatkan dua orang paras praktisi dari bank Indonesia.

2. Pengidentifikasian kepada para pelaku usaha dan pengurus BUMdes yang telah dan mengenal serta sudah menggunakan instrumen pembayaran digital.
3. Pemberian praktek tata cara bagaimana memiliki instrument pembayaran digital melalui mobile (hp)
4. Mendaftarkan peserta kedalam media digitalisasi pembayaran berupa QRIS, OVO, dll.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dalam rangka literasi keuangan digital bagi masyarakat di desa Bolihutuo dan desa Kaaruyan kabupaten Boalemo dilaksanakan dalam waktu 2 hari yakni tanggal 13 dan 20 November 2021. Adapun sebagai nara sumber pada kegiatan dimaksud adalah para praktisi dari Bank Indonesia perwakilan Gorontalo. Metode pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan cara paparan materi berupa:

1. Pengenalan materi literasi keuangan digital
2. QRIS (Quick Respon Code Indonesia Standard)
3. Praktek pemanfaatan layanan keuangan digital
4. Sosialisasi layanan keuangan digital lainnya seperti, OVO, dll.

Pembahasan

Layanan keuangan digital dikenal sebagai entuk pelayanan keuangan dengan menggunakan fasilitas mobile. Saat ini penggunaan layanan keuangan digital masih terbatas pada masyarakat perkotaan, terutama yang tinggal di kota-kota besar yang memiliki akses internet. Bagi masyarakat yang atinggal dipedesaan, layanan ini masih sangat kuranbg digunakan, mengingat akses internet yang masih belum maksimal dan juga fasilitas lainnya yan gmerupakan pendukung dari pelaksanaan layanan digital. Salah satu ciri khas layanan keuangan digital adalah, adanya system pembayaran yang dilakukan secara non tunai. Pembayaran dilakukan melalui kegiatan transfer atau dilakukan melalui fasilitas softwere berupa aplikasi pembayaran non tunaki seperti, OVO, Internet banking, SMS banking, uang elektronik, dll. Bagi masyarakat yang ada di pedesaan banyak yang belum mengenal metode pembayaran tersebut diatas.

Sebagaimana kita ketahui Bank Indonesia bersama beberapa lembaga terkait lain telah mencetuskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tanggal 14 Agustus 2014 yang bertujuan untuk mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia (tanpa terkecuali) akan pentingnya transaksi non tunai dan mengajak agar masyarakat beralih dari kebiasaan bertransaksi tunai ke non tunai. Dengan transaksi non tunai, akan lebih mudah, aman, efisien, akuntabilitas baik, dan transparan. Juga akan turut mengurangi potensi praktik korupsi, pemalsuan uang, pencurian, inflasi, dan dapat mengurangi beban Negara dalam pengadaan uang tunai. Dalam penyelenggaraannya di masyarakat, GNNT membutuhkan dukungan teknologi informasi dan

komunikasi yang memadai serta kondisi infrastruktur yang baik. Kondisi ini mungkin tidak menjadi masalah jika GNNT dilaksanakan di wilayah perkotaan yang telah terdapat banyak Bank, banyak tempat perbelanjaan telah menerapkan sistem non tunai, infrastruktur dan teknologi yang memadai faktor pendukung lainnya.

Masyarakat di desa dapat melakukan transaksi non tunai dengan sistem berbasis mobile dan atau berbasis jaringan (web) melalui koneksi internet atau online. Kedua basis non tunai ini mungkin karena sekarang perkembangan teknologi komunikasi berupa ponsel pintar (smart-phone) sudah sangat masif di tengah masyarakat, tidak terkecuali masyarakat desa. Dengan keberadaan smart-phone ini, transaksi non tunai berbasis mobile dan web mungkin untuk dilakukan. Untuk mendukung potensi tersebut, Bank Indonesia menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD yang bertujuan untuk perluasan akses layanan keuangan dan sistem pembayaran dalam mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang ditujukan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan individu atau rumah tangga, serta mengurangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia, Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga (selanjutnya disebut dengan agen LKD) serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif. Uang inklusif dapat diartikan sebagai kebijakan khusus terkait ekonomi yang ditujukan khusus untuk menanggulangi atau mengatasi masalah perekonomian

masyarakat kalangan bawah. Selanjutnya Agen LKD Individu merupakan perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum yang bekerjasama dengan Penerbit (dalam hal ini pihak Bank) dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD dalam lingkup terbatas. Layanan LKD ini diproses secara online, artinya bentuk transaksi LKD akan terkoneksi secara langsung dengan sentral sistem komputer untuk melakukan otorisasi dan validasi sebelum dimulainya proses transaksi. Proses online dilakukan agar penyelesaian transaksi LKD dapat dilakukan secara real time/aktual dan tersedia notifikasi status transaksi segera setelah terjadi transaksi keuangan, sehingga semua transaksi akan terekam dengan akurat dan rapi serta transparan.

Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD Individu memang diutamakan untuk wilayah operasional di Kelurahan atau Desa. Bentuk LKD melalui agen memberikan pelayanan kepada masyarakat desa diantaranya adalah:

1. Memfasilitasi masyarakat desa untuk melakukan registrasi dalam rangka memiliki LKD atau disebut dengan Pemegang. Perlu dipahami pula bahwa layanan LKD ini berbasis mobile dan web, artinya uang milik pemegang adalah dalam bentuk Uang Elektronik.
2. Melakukan pengisian ulang atau (top-up) baik saldo, deposito, dan lainnya.
3. Melakukan pembayaran atas tagihan rutin atau berkala seperti pembayaran listrik, air, telepon, angsuran kredit atau pembiayaan, premi asuransi, dan bentuk tagihan-tagihan lainnya.

4. Melakukan penarikan secara tunai.
5. Melakukan penyaluran program bantuan Pemerintah kepada masyarakat seperti bantuan sosial kepada masyarakat miskin, bantuan pembiayaan pendidikan, dan bantuan pembiayaan kesehatan dan pelayanan-pelayanan lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Semua layanan LKD melalui agen LKD tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan serta sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, LKD di desa setidaknya membutuhkan beberapa instrumen pendukung diantaranya:

1. Perlu adanya Bank di wilayah desa atau disebut Bank Cabang tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat desa melakukan registrasi, komunikasi, dan transaksi serta mendapatkan informasi terkait dari pihak Bank dan ini adalah merupakan tugas dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara layanan.
2. Teknologi informasi dan komunikasi serta koneksi jaringan internet yang memadai karena LKD menggunakan layanan berbasis mobile dan atau web/laman Bank terkait. Ini merupakan tugas dari Pemerintah, Kemkominfo, dan lembaga terkait lainnya.

Jika kedua instrumen ini terpenuhi, maka LKD dapat berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Dengan LKD ini juga membuktikan keseriusan komitmen Bank Indonesia agar GNNT dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak

terkecuali masyarakat desa karena semua perlu terbiasa dan merasakan manfaat bertransaksi non tunai. LKD adalah solusi masalah transaksi non tunai di desa.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pelaksanaan pengabdian tentang Literasi keuangan digital bagi masyarakat di desa Bolihutuo dan desa Kaaruyan Kabupaten Boalemo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Layan Keuangan Digital bagi masyarakat pedesaan khususnya di desa Boliohuto dan Desa Kaaruyan belum secara optimal dilaksanakan.
2. Masyarakat di desa Bolihutuo dan desa Kaaruyan khususnya bagi pelaku usaha dan pengurus BUMdes belum mengenal dan mengetahui secara jelas yang dimaksud dengan Layana Keuangan Digital.
3. Fasilitas pendukung dalam pelaksanaan layanan digital di desa Boliohuto dan desa Kaaruyan belum tersedia.
4. Keberadaan bank sebagai pendukung utama juga masih kurang, kalau pun ada sangat jauh dari desa.

B. Saran

1. Optimiliasasi pelaksanaan literasi tentang keuanvgn digital di daerah pedesann perlu ditingkatkan.
2. Literasi keuangan digital bagi para pelaku usaha dan pengurus BUMdes di desa Bolihutuo dan desa Kaaruyan perlu di optimalkan lagi, mengingat kedua desa tersebut berada pada jalur trans Sulawesi yang merupakan poros jalan utama loitnas Kabupaten bahkan antar Provinsi.
3. Penambahan fasilitas pendukung pelayanan layanan keuangan Digital, terutama akses internet/.
4. Perlu intervensi para perbankan untuk mengenalkan dan memberikan fasilitas layana Keuanan Digital bagi para pelaku usaha dan pengurus BUMKdes di kedua Desa tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak lupa tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Universitas Negeri Gorontalo yang telah mendukung hingga terlaksananya kegiatan pengabdian ini.

REFERENCES

- Atkinson, A., & Messy, F. (2013). *Assessing Financial Literacy in 12 Countries. Indonesia, D.P.R R.* (2011).
- UU Nomor: 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa lembaga keuangan. Keuangan, O.J. (2017). *STRATEGI NASIONAL LITERASI KEUANGAN INDONESIA (Revisit 2017)*.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2007). *Baby Boomer Retirement Security : The Roles of Planning , Financial Literacy , and Housing Wealth Baby Boomer Retirement Security: The Roles of Planning , Financial Literacy , and Housing Wealth. Journal of Monetary Economics, 54, 205-224., 54, 205–224. 0*
- Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an Internationally Comparable Survey of Financial Literacy. (n.d.)*.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T. R. I. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, 1–11. Mishkin, F. S. (2013)*.
- The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, Global Edition - Tenth Edition, Pearson. (10th Editi). Pearson. Zulbetti, R. (2012). Pengaruh rasio-rasio camel dan faktor-faktor makroekonomi terhadap. Banking & Management Review, 1(Mei 2012), 48–62.*